ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara inflasi, penyesuaian upah minimum riil, dan kesejahteraan masyarakat (diukur melalui Tingkat Kemiskinan/TPM dan Gini Ratio) di 34 provinsi Indonesia selama 2015–2025, menggunakan data panel seimbang sebanyak 374 observasi provinsi-tahun. Setelah IHK disambung ulang ke basis tunggal (2012=100), UMP Riil menunjukkan tiga fase: pertumbuhan positif sebelum pandemi (2015–2019), kontraksi selama pandemi (2020–2022), dan pemulihan sebagian pascapandemi (2023–2025) yang belum kembali ke lintasan semula.

Uji pemilihan model secara konsisten memilih *Fixed Effects Model*, dengan berbagai masalah diagnostik (heteroskedastisitas, autokorelasi, ketergantungan lintas unit) diatasi melalui *cluster-robust standard errors* serta pengecekan tambahan menggunakan *Driscoll-Kraay* dan *wild cluster bootstrap*. Hasil menunjukkan inflasi tidak memiliki hubungan yang stabil dengan kedua indikator kesejahteraan, sedangkan UMP Riil berhubungan negatif dan signifikan dengan TPM dan GINI pada model dasar, hubungan dengan kemiskinan lebih konsisten bertahan pada berbagai uji robustness dibanding hubungan dengan ketimpangan yang bersifat kondisional.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum yang menjaga daya beli riil lebih konsisten menekan kemiskinan absolut dibanding meratakan distribusi pendapatan, dan bahwa pengaruh inflasi terhadap kesejahteraan sejalan dengan dugaan mekanisme erosi nilai riil upah, meski kausalitas mediasi ini tidak diuji secara formal.

Kata Kunci: Inflasi, Upah Minimum, Kesejahteraan Masyarakat, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio, Data Panel, Indonesia.

SEMARANG
FEB UNDIP